

## WACANA

Selasa Wage, 22 November 2011

HALAMAN 4

## Keterbukaan Informasi Lembaga Publik

KAMIS 17 November 2011, Forum LSM mendiskusikan hasil survai kesiapan Badan Publik mengimplementasikan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Survai ini melibatkan 300 responden yang "mewakili" Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan diskusi dihadiri sejumlah pejabat DIY, termasuk Kepolisian. Apa hasilnya?

**Transparansi**  
Salah satu temuan pokok mengenai Badan Publik di DIY telah mengarah atau menuju pada transparansi pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa responden yang jabatannya terkait dengan pelayanan informasi di lembaganya ada sebanyak 209 orang atau 69,67 persen. Artinya, secara internal lembaga-lembaga publik di provinsi ini telah memiliki pejabat yang mengurus pelayanan informasi seperti diamanatkan Pasal 13 ayat 1 UU KIP.

Undang-Undang ini menyatakan "untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID". Akan tetapi penunjukkan itu harus diikuti dengan tugas "membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional".

Kendati tampak sederhana, namun pembuatan dan pengembangan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar ini tidak sesederhana dalam praktiknya. Pada kenyataan sehari-hari kita acapkali menjumpai lembaga-lembaga publik tidak dapat menyediakan informasi dengan cepat. Ada sejumlah faktor penyebab, antara lain, bila layanan diberikan melalui telepon maka sistem telepon internal yang dihubungi tidak serta merta menyambungkan ke alamat tujuan sehingga informasi tidak segera didapat. Bila sudah tersambung, informasi yang dimintapun tidak dengan cepat diberikan dengan alasan petugas atau "pemilik" informasi tidak ada di tempat.

Oleh : Lukas S. Ispandriarno

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Membangun sistem layanan informasi yang mudah juga tak semudah yang dialami warga masyarakat. Misalnya, masih banyak kantor lembaga publik yang tidak memasang petunjuk ruang, nama petugas dan jabatannya, apalagi memasang jadwal waktu yang menginformasikan kapan ia bisa atau tidak bisa ditemui. Petunjuk arah dan ruang memang sederhana dan mudah tapi tidak otomatis tersedia, termasuk di perkantoran yang besar, luas serta di gedung bertingkat. Asumsinya, pencari informasi bisa bertanya kepada "orang di sekitar" atau Satpam. Bila asumsi ini benar maka, genaplah kita disebut sebagai masyarakat yang lebih gemar mengembangkan budaya lisan ketimbang budaya tulis.

Minimnya informasi tertulis juga dengan mudah kita jumpai di kota, kabupaten, kecamatan, maupun perdesaan. Masih banyak jalan di kota maupun kabupaten, kecamatan dan perdesaan tidak diberi papan petunjuk. Bahkan dalam tingkat individu atau keluarga, rumah-rumah di kotapun tidak dipasang atau ditulis nomor.

Temuan menarik lain terkait dengan transparansi adalah : *Pertama*, sebanyak 234 responden (78 persen) mengaku lembaganya telah memiliki aturan internal atau *Standar Operating Procedure* untuk pelayanan informasi berdasarkan peraturan dari Komisi Informasi Pusat (Perkip). *Kedua*, sebagian besar (75,67 persen) menyatakan di lembaganya telah tersedia informasi berkala dan 52 persen informasi serta merta, yaitu informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak. Sebagian besar (96,92 persen) berupa profil lembaga, kegiatan dan kinerja (92,07 persen), informasi keuangan (51,1 persen), dan sebanyak 18,06 persen informasi

lainnya. Apa maknanya?

**Akuntabilitas**

Informasi memang terkait erat dengan akuntabilitas. Badan Publik mesti menganut prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi. Tujuannya adalah *good governance*, seperti juga diamanatkan UU KIP di mana keterbukaan informasi pu-

blik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun Badan Publik. Kinerbukaan informasi juga merupakan syarat penting negara demokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dari temuan ketersediaan informasi di atas terlihat bahwa semakin penting informasi itu (tentang keuangan) tingkat ketersediaannya justru semakin kecil. Tentu saja hal ini mengkhawatirkan karena jauh dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga hal ini dapat berakibat pada munculnya konflik kepentingan pada berbagai kebijakan yang dapat menyeret Badan Publik ke tindak korupsi. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat (Haryatmoko, 2011: 106). Akuntabilitas dipergunakan untuk mengukur apakah "mandat rakyat" dijalankan dengan baik, dan itu antara lain dijalankan melalui pertanggungjawaban, kekuasaan melalui keterbukaan atau akses informasi bagi pihak luar organisasi.

Pertanggungjawaban keuangan lembaga publik dapat dibaca dari praktek-praktek sederhana namun mendasar, misalnya, apakah biaya yang dikeluarkan masyarakat ditulis dan diberikan dalam bentuk kwitansi. Apakah yang tertulis dalam tanda

pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan? Di sebuah bank, ongkos sepuluh ribu rupiah yang harus dibayar pengguna kartu kredit karena pembayarannya melalui *teller* (tidak melalui ATM) mengharuskan pengguna menuliskan "jumlah yang dibayar dalam huruf" minus sepuluh ribu rupiah yang dibayarkan itu. Ke mana uang "denda" tadi dilaporkan?

Salah satu pengertian tentang Badan Publik dalam UU ini adalah lembaga yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Oleh karena itu dalam pasal 15 UU ini disebutkan pula kewajiban partai politik untuk menyediakan informasi kepada publik. Di antaranya adalah kewajiban menyajikan informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Survai ini tidak menjelaskan apakah partai politik sudah termasuk sebagai salah satu respondennya. Tentu menarik untuk mengetahui apakah parpol sudah siap mengimplementasikan UU KIP sebab berbagai kasus korupsi belakangan ini banyak terkait dengannya, antara lain kasus Nazaruddin dan sejumlah kasus yang melibatkan orang penting di Kementerian di republik ini dan berbagai kasus di DIY.

Bila ditelisik lebih lanjut, khususnya melalui riset kualitatif, diyakini praktek-praktek tertutupan lembaga publik dalam hal keuangan masih banyak dijumpai di wilayah DIY. Survai yang diselenggarakan Forum LSM ini memang baru menemukan data awal, informasi permukaan, tentang kesiapan Badan Publik menyongsong pelaksanaan UU KIP. Sangat layak untuk ditindaklanjuti dengan riset yang lebih jauh terutama melalui wawancara mendalam dengan masyarakat pengguna lembaga publik. Riset dapat difokuskan pada lembaga tertentu seperti pendidikan, kesehatan, politik atau kepolisian. \*\*\*

Lukas S. Ispandriarno, Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.